

DAFTAR PUSTAKA

- Arnati, & Muammar. (2012). Dampak Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Jumlah Pajak Penghasilan Tahunan. *Jurnal Integrasi*, 4(2), 187–193.
- Baharta, Zulkarnain, Inggriani Elim, dan H. R. . (2020). *Evaluasi Perhitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada Kantor Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kotamobagu*. 15(2), 94–100.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2012). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per - 31/Pj/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Pajak Penghasilan (PPh)*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.” *Jdih.Kemenkeu.Go.Id*, April, 1–4.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2020). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu* (38th ed.). Ikatan Akuntan Indonesia.
- Institut Agama Islam Negeri Madura. (2020). *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Institut Agama Islam Negeri Madura.
- Kementerian Keuangan. (2008). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/Pmk.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan Atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan*.
- Kementerian Keuangan. (2014). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/Pmk.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak*. 98.
- Kementerian Keuangan. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJPb*.
- Kementerian Keuangan. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/Pmk. 010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain*.

- Kementerian Keuangan. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231 /Pmk.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pe.* www.jdih.kemenkeu.go.id
- KPPN Pematang Siantar. (2022a). *KPPN Pematang Siantar*. KPPN Pematang Siantar. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/pematangsiantar/id/>
- KPPN Pematang Siantar. (2022b). *Visi dan Misi*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/pematangsiantar/id/profil/visi-misi.html>
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: WaRachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40. <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184wawancara>. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40.
- Raco, J. (2010). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Republik Indonesia. (2004). UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 1–32.
- Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil*.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Dengan*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.